

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR**

**ANDI MAHYUDIN PAWILOI**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANDI MAHYUDIN PAWILOI**  
**A31110254**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh

**ANDI MAHYUDIN PAWILOI  
A31110254**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, September 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP, Ak, CA  
NIP 195611211986031001

Drs. Haerial, M.Si., Ak, CA  
NIP 196310051981031002

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, SE, M.Si, Ak., CA  
NIP 196509251990022001

# SKRIPSI

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**ANDI MAHYUDIN PAWILOI**  
**A31110254**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **13 Nopember 2014** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Rusman Thoeng, M.Com, BAP, Ak., CA	Ketua	1. ....
2.	Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2. ....
3.	Dr. Yohanis Rura, SE, M.SA, Ak., CA	Anggota	3. ....
4.	Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA	Anggota	4. ....
5.	Drs. Deng Siraja, M.Si., Ak., CA	Anggota	5. ....

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP 196509251990022001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : ANDI MAHYUDIN PAWILOI

NIM : A31110254

jurusan/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Nopember 2014

Yang membuat pernyataan

Andi Mahyudin Pawiloi

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **"Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar"** merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Universitas Hasanuddin Makassar.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati, peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, kepada yang terhormat :

1. Keluarga besar H. Andi Ismail Pawiloi dan Hj Erni Trishanti Andayani yang telah banyak berkorban untuk keberhasilan pendidikan peneliti.
2. Bapak. Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP., Ak., CA dan Bapak. Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA selaku pembimbing satu dan pembimbing dua atas perhatian, bantuan, motivasi dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak. Dr. Yohanis Rura, SE., M.SA., Ak., CA., Bapak. Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA., dan Bapak. Drs. Deng Siraja, M.Si., Ak., CA., selaku tim penguji tidak hanya menguji tetapi juga memberikan arahan khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., M.Soc., SC., Ak., CA., selaku penasihat akademik peneliti.
5. Ibu Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.

6. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, semoga tetap menjadi sahabat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya.
7. Ibu Perpustakaan yang senantiasa membantu peneliti khususnya dalam hal administrasi peminjaman buku. Berkat kerendahan hati beliau sehingga peneliti bisa memperoleh bahan bacaan yang dibutuhkan dengan mudah.
8. Pak Aso, Pak Akbar, Ibu Ida, Pak Masse, Pak Asmari, Pak Tarru selaku staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang senantiasa membantu peneliti dalam hal administrasi selama kuliah serta tentunya memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Terimakasih yang sebesar-besarnya.
9. Pimpinan dan seluruh staf Kantor DISPENDA Kota Makassar yang telah menerima peneliti dengan senang hati untuk mengadakan penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
10. Keluarga besar P10neer Uci, Kiki, Ifa, Syakir, Marlinda, Nora, Melina, Iqbal, Megawati, Ita, Awal, A. Ayu, Neneng, Yogo, Aiman, Malsi, Umrah, Noe, Abit, Ayu, Arini, Andiza, Uci, Ninis, Fitrah, Ayu, Glo, Titi, Nanda, Rere, Upi, Dika, Papaw, Nisa, Eni, Fadli, Ambo, Kiki, Astrid, Farah, Afri, Rara, Dian, Anang, Gadis, Donna, Haidir, Man, Agus, MM, Andi, Tito, Fatma, Yuliana, Wiwid, Pricil, Maryam, Ical Hap, Hans, Yus, Adnin, Nur, Fany, Ita Reski, Azwin, Nela, Bony, Rahman, Apri, Iren, Rika, Siti, Eni, Farah, Acid, Jannah, Sela, Tini, Hangga, Ahmad, Hary, Helni, Ilman, Sela, Budi, Iksan, Anwar, Indi, RR, Hanif, Rian, Dika, Angga, Ani, Yuha, Hambali.
11. Kanda-kanda Ikatan Mahasiswa Akuntansi yang menjadi mentor dalam belajar hal-hal yang luar biasa Kak Rahmat, Kak Fajar, Kak Dade, Kak Tope, Kak Yaya, Kak Irma, Kak Iklas, terimakasih atas waktu berdiskusinya.

12. Keluarga Ikatan Mahasiswa Akuntansi, Aan, Agung, Asti, Azril, Cibi, Dayat, Fadil, Fahmi, Hardi, Jerry, Noni, Nua, Nunu, Ojan, Piank, Pute, Silvi, Arini, Nona, Ian, Arif, Rijal, Tariq, Uci, Wachi, Zaki, Eko, Thaibi, Amir, Annisa, Ausy, Jul, Made, Supriadi, Ulan, Salsa, Salmiah.
13. Keluarga besar Ekonomi Futsal, Kak Chumbu, Kak Zar, Idu, Uyun, Fadillah, Muklas, Vialy, Tri W, Tri D, Rasul, Nasri, Tiar, Fikar, Adiatma, Ruli, Oka, Attang, Fadhil, Muliadi, Azhari, Ica, Intan, Nysa.
14. Para penyuplai logistik yang oleh kami mahasiswa ekonomi akrab dengan sapaan Mace (Mace Aji, Mace Rohani, Mace Mala) serta penyuplai kebutuhan administrasi (Kak Ela, Kak Santi, dkk).

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Makassar, September 2014

Peneliti



## ABSTRAK

### **Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar**

#### ***The Contribution Analysis of Advertisement and Hotel Tax to the Local Revenue of Makassar***

Andi Mahyudin Pawiloi  
Rusman Thoeng  
Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dalam penelitian adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2009-2013 adalah relatif tidak signifikan karena tren keduanya berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir dan efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hotel menurun dalam lima tahun terakhir sehingga belum mampu meningkatkan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

**Kata Kunci:** Analisis Kontribusi, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

*This study aims to determine the contribution of advertisement and hotel tax to the Local Revenue of Makassar City. Data collection techniques used in this study are interviews, observations, and documentations. Data analysis in this study is a quantitative analysis. The results showed that the contribution of advertisement revenues and hotel tax to Local Revenue of Makassar in 2009-2013 was relatively insignificant because the trends are both inversely proportional to the Local Revenue of Makassar which increase in the last five years and the effectiveness of the advertisement revenues and hotel tax decrease in the last five years therefore not been able to increase the contribution of the advertisement and hotel tax to Local Revenue of Makassar.*

**Keywords:** Contribution Analysis, Advertisement Tax, Hotel Tax, Local Revenue

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penelitian .....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	 8
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep .....	8
2.1.1. Pengertian Pajak .....	8
2.1.2. Pengertian pajak Reklame .....	14
2.1.3. Pengertian Pajak Hotel .....	19
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah .....	24
2.2. Penelitian Terdahulu .....	27
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 31
3.1. Rancangan Penelitian .....	31
3.2. Daerah dan Waktu Penelitian.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	32
3.5. Metode Analisis Data .....	32
3.5.1. Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel.....	32
3.5.2. Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Pajak Hotel.....	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 35
4.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian .....	35
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar .....	35
4.1.2. Visi dan Misi Dispenda Kota Makassar .....	36
4.1.4. Uraian Tugas .....	37
4.2. Hasil Penelitian .....	43
4.2.1. Analisis Kontribusi Pajak Reklame .....	48
4.2.2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel .....	50
4.2.3. Efektivitas Pajak Reklame Kota Makassar .....	52
4.2.4. Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar .....	65
4.3. Pembahasan.....	57

BAB V	PENUTUP .....	58
5.1.	Kesimpulan .....	58
5.2.	Saran-saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA	.....	59
LAMPIRAN	.....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu .....	27
3.1	Pengukuran Nilai Efektivitas .....	34
4.1	Data Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel.....	44
4.2	Pertumbuhan Pajak Reklame .....	45
4.3	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel.....	45
4.4	Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah .....	46
4.5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah .....	47
4.6	Kontribusi Pajak Reklame .....	49
4.7	Kontribusi Pajak Hotel .....	51
4.8	Efektivitas Pajak Reklame .....	53
4.9	Efektivitas Pajak Hotel .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
4.1	Data Pendapatan Asli Daerah .....	47
4.2	Kontribusi Pajak Reklame .....	49
4.3	Kontribusi Pajak Hotel .....	52
4.4	Efektivitas Pajak Reklame .....	54
4.5	Efektivitas Pajak Hotel .....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata .....	62
2 Daftar Target dan Realisasi PAD .....	63
3 Daftar Rincian APBD .....	64
4 Daftar Target dan Realisasi Pajak Reklame .....	66
5 Daftar Target dan Realisasi Pajak Hotel .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak daerahnya, hal ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah mampu mengelola segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tidak mampu mengelola segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah selain perimbangan keuangan antar pusat dan daerah yang kurang merata, masih kurang maksimalnya prospek kemampuan

pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi dan pajak daerah serta sumber pendapatan lainnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Beberapa komponen pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Empat komponen tersebut, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.



Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak reklame dan pajak hotel. Pajak reklame maupun pajak hotel diharapkan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengertian Pajak Reklame dan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah bab 1 pasal 1 angka 16 dan 17 adalah:

“ Pajak Reklame adalah pajak atas reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa orang, atau badan, yang dapat dilihat, di baca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum”

Untuk mengetahui tinggi rendahnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame dapat dilihat dari hasil jumlah keseluruhan realisasi pendapatan pajak reklame dari tiap-tiap tahun. Menurut Sulistiani (2014) kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya meskipun masih bersifat fluktuatif.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no 28 tahun 2009 Pajak Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga montel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Kontribusi yang

maksimal dari pajak hotel tertentu secara langsung akan berdampak baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak hotel.

Setiap tahun pajak reklame dan pajak hotel mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut merupakan gambaran efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah, utamanya pajak reklame dan pajak hotel. Peningkatan pemungutan pajak reklame dan pajak hotel tentunya akan berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang berkaitan dengan pajak reklame dan pajak hotel telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Komala (2010), Adi (2012), Sulistiani (2014). Komala, (2010) meneliti tentang “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang sangat kuat bahkan sempurna antara jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara secara bersama – sama terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Sedangkan rata – rata besarnya kontribusi realisasi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,57% per tahun dan Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun. Penelitian yang dilakukan Adi (2012) tentang kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri menyimpulkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Kediri sangat potensial dibanding pajak daerah yang lain. Untuk memanfaatkan potensi tersebut pemerintah Kabupaten Kediri melalui DPPKAD berupaya melakukan penugasan untuk melakukan panjaringan pajak reklame di kecamatan, mengadakan penertiban dengan pihak terkait, dan mengadakan koordinasi

dengan pihak KPPT dan Satpol PP menjaring pengusaha untuk mengajukan ijin tetapi belum membayar pajak.

Penelitian Sulistiani (2014) mengenai analisis potensi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar periode 2008 – 2012 menunjukkan potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar tahun 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun masih terdapat potensi yang belum tergali secara optimal. Sistem pemungutan pajak reklame yang diberlakukan DISPENDA Kota Makassar yaitu sistem *official assessment*. Untuk tahun 2008 – 2010 kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun terjadi penurunan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada tahun 2011 dan 2012. Pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar telah efektif karena mampu melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”**. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang perpajakan mengenai analisis kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar dan juga sebagai acuan atau dasar bagi penelitian-penelitian mendatang.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Sebagai kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan atau perbandingan bagi pihak Dispenda Kota Makassar dalam melakukan langkah-langkah yang tepat dalam pemungutan pajak reklame dan pajak hotel, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan teori dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, rancangan penelitian, daerah dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan sumber utama untuk pembangunan. Karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Sementara itu disisi lain, fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak, juga telah memberi andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan ini. Karena itu hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat harus seimbang dan adil.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan iuran wajib dan pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak, dan dapat dengan pidana penjara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.

Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2012:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah

Sedangkan menurut Soemitro dalam Fidel (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Casavera (2009:3) mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yolina (2009:11) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berikut.

1. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dengan iuran berupa uang bukan barang

2. Berdasarkan Undang-undang

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



### 2.1.1.1 Fungsi Pajak

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat wajib pajak (*tax player*) harus menjadi perhatian semua pihak.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2003:2) yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

#### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

#### 2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah sebagai berikut.

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal

- harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
  - c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
  - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
  - e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
  - f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

#### **2.1.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2012:6) bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu sebagai berikut.

##### **1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

## 2. Stelsel Anggapan (*Assumption Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdikan kepada keadilan, maka tujuan hukum pajak adalah membuat azas-azas keadilan dalam pemungutan pajak. Asas keadilan dipegang teguh, baik dalam prinsip-prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang harus diperhatikan oleh penyelenggara negara dalam melakukan pemungutan pajak.

Usaha mencari keadilan dalam pemungutan pajak, menimbulkan berbagai pendapat dan teori, sebagian hasil pemikiran sarjana-sarjana barat membenarkan serta memberikan dasar hukum pada pemungutan pajak dan meyakinkan bahwa pemungutan pajak itu adalah halal, tidak dianggap sebagai suatu perampasan yang sewenang-wenang.

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan Smith dalam buku Waluyo (2002:5) bahwa pungutan pajak didasarkan pada berikut ini.

- a. Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*), artinya ialah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.
- b. Prinsip kepastian (*certainty*), artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
- c. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*), artinya pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
- d. Prinsip ekonomi (*economy*), artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

### **2.1.2 Pengertian Pajak Reklame**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda,

alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa *terminologi*, yaitu sebagai berikut.

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- b. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- c. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- e. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
- f. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- g. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- h. Surat Permohonan Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disingkat APPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan

permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

- i. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

#### **2.1.2.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame**

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota (Siahaan, 2013:383) adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1967 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

#### **2.1.2.2 Objek Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kesatu Pasal 26 ayat (2) dan (3) yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut:

- a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;

- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;

#### **2.1.2.3 Bukan Objek Pajak Reklame**

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kesatu Pasal 26 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga sosial, keagamaan dan pendidikan tanpa menggunakan label/merk produk dagang.

#### **2.1.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kesatu Pasal 27 adalah sebagai berikut.

1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.

2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
4. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

#### **2.1.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 28 adalah sebagai berikut.

1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
4. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



#### **2.1.2.6 Tarif Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 29, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### **2.1.2.7 Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 29, cara perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah:

NSR= jenis x bahan x lokasi x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah x ukuran media reklame.

Adapun perhitungan besaran pokok Pajak Reklame yang terutang sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Bab VI Bagian Kedua Pasal 30 adalah.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak.  
= Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame.

#### **2.1.2.8 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 30 adalah.

1. Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam Kota Makassar
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin.

#### **2.1.3 Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,

termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel (Siagian, 2005 : 245). Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan

pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Contoh pembayaran, misalnya seseorang menginap di hotel "ABC" dan melakukan pembayaran atas

Jasa sewa kamar	Rp.2.500.000,00
Jasa binatu	Rp. 200.000,00
Jasa telepon	Rp. 100.000,00
	————— +
Jumlah	Rp.2.800.000,00
 Service Charge 10%	 Rp. 280.000,00
	————— +
Jumlah pembayaran	Rp.3.080.000,00

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan pajak hotel, yaitu sebesar Rp.3.080.000,00

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan} \\
 &\quad \text{Kepada Hotel}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Hotel "ABC" di atas dan apabila besarnya tarif pajak yang ditetapkan pada kota di mana Hotel "ABC" berlokasi, adalah sebesar sepuluh persen, maka dapat dihitung besarnya pajak hotel yang terutang, yaitu sebesar: 10 % x Rp.3.080.000,00 = Rp.308.000,00.

#### **2.1.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

#### **2.1.3.2 Objek Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang menjadi objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Adapun jasa penunjang yang di maksud adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan sejenis lainnya yang di sediakan atau dikelola hotel.

#### **2.1.3.3 Bukan Objek Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (4) yang bukan objek pajak hotel adalah sebagai berikut.

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis; dan
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **2.1.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab III Bagian Kesatu Pasal 4 adalah sebagai berikut.

1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
2. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan mengusahakan Hotel.

#### **2.1.3.5 Tarif Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pajak Daerah Bab III Bagian Kedua Pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **2.1.3.6 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab III Bagian Ketiga Pasal 8 adalah.

1. Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam Kota Makassar.
2. Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

#### 2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang dapat diukur dengan uang karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baik pula kemampuan dalam melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah maka semakin mandiri suatu daerah tersebut. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur kemampuan dari suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah. Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai pendapatan asli daerah di setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota tidak banyak berubah. Artinya sumber utama pendapatan daerah komponennya itu yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba dari BUMD. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (*national fiscal policy*) pemerintah pusat dalam APBN yang tetap mengandalkan penerimaan jenis pajak yang subur untuk kepentingan nasional.

Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintahan daerah (pemda) berlomba-lomba menciptakan kreativitas baru untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD di masing-masing daerah.

Selama PAD benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, investor lokal, maupun investor asing, tentu tidak masalah. Dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun

mengidentifikasi daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat.

Sebaliknya, jika peningkatan PAD justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sebab peran pemda dalam perekonomian daerah cenderung akan semakin menurun, karena perubahan fungsi pemerintahan ke arah fasilitator. Artinya, inisiatif memang harus datang dari masyarakat lokal yang sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan pemda.

Memang jika dikaji secara cermat, kebijakan PAD tidak berkaitan langsung dengan implementasi desentralisasi. Tanpa desentralisasi pun PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Namun, nilai dan peran PAD selama ini masih relatif kecil dan banyak tergantung kepada pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) yang dilihat dari besar kecilnya nilai investasi di suatu daerah.

Umumnya, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi, dengan peningkatan nilai investasi yang tinggi setiap tahun akan memberikan kontribusi cukup besar terhadap pajak dan atau PDRB. Jika dibandingkan antara daerah perkotaan dan kabupaten, maka kegiatan perekonomian jauh lebih berkembang di kota dibandingkan dengan daerah kabupaten. Oleh sebab itu, PAD daerah perkotaan cenderung lebih besar daripada PAD daerah kabupaten. Seperti diketahui, sebagian besar daerah di Indonesia merupakan kabupaten, wajar bila sebagian besar kabupaten di Indonesia berusaha untuk meningkatkan PAD-nya agar tidak jauh berbeda dengan daerah perkotaan. Namun, daerah kabupaten dengan potensi

sumber alam cukup besar cenderung mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Berbicara mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Saragih (2003 : 52) undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik provinsi, Kabupaten, Kotamadya menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1974 adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan asli daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan non pajak
3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Pendapatan daerah sebagaimana dikemukakan oleh Fauzi dan Iskandar (2007:10) bahwa pendapatan daerah adalah komponen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dari beberapa sumber yang telah digali untuk mendapatkan hasil, guna untuk membiayai pembangunan di daerah dengan menggunakan peraturan-peraturan daerah tersebut.



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 penelitian terdahulu

<b>Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Komala (2010), Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal	1. Mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Mengetahui seberapa besar jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara mempengaruhi realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal. 3. Menganalisis upaya	Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang sangat kuat bahkan sempurna antara jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara secara bersama – sama terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Sedangkan rata – rata besarnya kontribusi realisasi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,57% per tahun dan Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun.

	peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor hotel dan restoran.		
Adi (2012), Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan penerimaan dari pajak reklame serta hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Kediri sangat potensial dibanding dengan pajak daerah yang lain. Hal ini bisa dilihat dari tahun ke tahun target dan realisasi selalu mengalami peningkatan. Pajak reklame memberikan kontribusi yang kecil terhadap pajak daerah Kabupaten Kediri dengan rata-rata sebesar 3,27%. Pajak reklame memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri dengan rata-rata sebesar 0,93%. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri melalui DPPKAD sudah berjalan baik

	reklame.		yaitu
Sulistiani (2014), Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	<p>1. Untuk mengetahui besar potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar.</p> <p>2. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.</p> <p>3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame yang dilakukan DISPENDA Kota Makassar selama tahun</p>	Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar untuk tahun 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun masih terdapat potensi yang belum tergali secara optimal. Sistem pemungutan pajak reklame yang diberlakukan pihak DISPENDA Kota Makassar yaitu sitem <i>official assessment</i> .

	anggaran 2008-2012.		
--	---------------------	--	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kuantitatif untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dan pajak hotel dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Unit analisis dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Horizon waktu penelitian ini selama tiga bulan dalam waktu tersebut peneliti melakukan observasi, pengumpulan data yang ada, serta wawancara untuk dapat melihat kondisi di lapangan.

#### **3.2 Daerah dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sedangkan waktu peneliti butuhkan mulai dari penyusunan proposal hingga rampungnya skripsi ini adalah kurang lebih tiga bulan lamanya, yakni mulai dari bulan Maret s/d bulan Mei 2014.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara mengenai pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar seperti: pajak

reklame dan pajak hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya tahun 2009 - 2013.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung atas obyek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.
2. Observasi, yaitu dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti dengan mencatat keterangan atau hal-hal yang berguna bagi penyusunan data untuk dianalisis.
3. Dokumentasi, yaitu dengan membuat salinan atau mengadakan arsip-arsip dan catatan-catatan yang ada mengenai pajak reklame dan pajak hotel serta data lainnya yang menjang pembahasan ini.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menampilkan kondisi yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

#### **3.5.1 Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan kontribusi. Alat analisis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak reklame dan hotel

terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dan hotel terhadap pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut. (Komala, 2010)

$$Pn = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn = Kontribusi penerimaan pajak reklame dan hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

QY = Pendapatan Asli Daerah

QX = Penerimaan pajak reklame dan pajak hotel

### 3.5.2 Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Pajak Hotel

Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak reklame dan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel yang didapatkan dari jumlah penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam suatu periode.

Adapaun rumus pengukuran efektivitas pajak reklame yang dikemukakan oleh Halim (Triantoro, 2010:3)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{Target penerimaan pajak reklame}} \times 100 \%$$

Adapun pengukuran nilai efektivitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dari kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 pengukuran nilai efektivitas

Nilai Kinerja	Keterangan
> 100%	Efektif
85 s.d. 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
< 65%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010 : 111)



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar**

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pngelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu.

Prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
2. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD.
3. Meningkatkan koordinasi.
4. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
5. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
7. Melakukan evaluasi secara berkala.
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
9. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

#### **4.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**

##### **1. Tugas pokok**

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah.

##### **2. Fungsi**

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

- b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. Pembinaan unit pelaksana teknis.

#### **4.1.3 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar**

##### **1. Kepala Dinas**

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.

##### **2. Sekretariat**

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas

Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
- c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
- f. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;

- g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
- j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
- d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;

- f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
- b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
- c. membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
- d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
- e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
- g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan;
- h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
- c. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

#### 7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi:

melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- a. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- b. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- d. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

#### 8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
- c. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

#### 9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan



Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
- d. koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e. pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- f. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah khususnya di kota Makassar namun dalam penelitian ini difokuskan pada pajak reklame dan pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran, sedangkan yang menjadi pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat atau media untuk tujuan komersial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian adalah pajak

reklame dan pajak hotel dengan periode pengamatan tahun 2009-2013. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan data pajak reklame dan pajak hotel yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel TAHUN 2009–2013

Tahun	Besarnya Pajak Reklame (Rp)	Besarnya Pajak Hotel (Rp)
2009	7.093.462.210	26.320.810.853
2010	11.336.841.164	31.617.040.229
2011	16.936.119.593	35.099.580.609
2012	19.067.461.127	37.706.182.022
2013	19.581.691.485	44.517.581.341
Rata Rata Pertahun	14.803.115.116	35.052.239.011

Sumber : Dispenda Kota Makassar, 2014

Berdasarkan tabel 4.1, maka besarnya rata-rata pajak reklame pertahun sebesar Rp. 14.803.115.116,- dan data penerimaan pajak hotel yaitu sebesar Rp. 35.052.239.011,- sehingga dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Makassar maka pertumbuhan pajak reklame yang dapat disajikan melalui tabel 4.2 yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2009 – 2013

Tahun	Besarnya pajak reklame (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	%
2009	7.093.462.210	-	-
2010	11.336.841.164	4.243.378.954	59,82
2011	16.936.119.593	5.599.278.429	49,39
2012	19.067.461.127	2.131.341.534	12,58
2013	19.581.691.485	514.230.358	2,69
Rata-rata Pertumbuhan pertahun		3.122.057.319	31,12

Sumber : Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.2 yakni pertumbuhan pajak reklame selama 5 tahun terakhir, maka rata-rata pertumbuhan pajak reklame meningkat sebesar Rp. 3.122.057.319,- atau sebesar 31,12%. Kemudian dilihat dari hasil analisis pertumbuhan pajak reklame maka dari tahun ke tahun pajak reklame meningkat.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2009 S/D 2013

Tahun	Besarnya pajak hotel (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	%
2009	26.320.810.853	-	-
2010	31.617.040.229	5.296.229.376	20,12
2011	35.099.580.609	3.482.540.380	11,01
2012	37.706.182.022	2.606.601.413	7,42
2013	44.517.581.341	6.811.399.319	18,06
Rata-Rata Pertumbuhan pertahun		4.549.192.622	14,15

Sumber : Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.3, pertumbuhan pajak hotel menunjukkan kondisi bahwa selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar Rp.

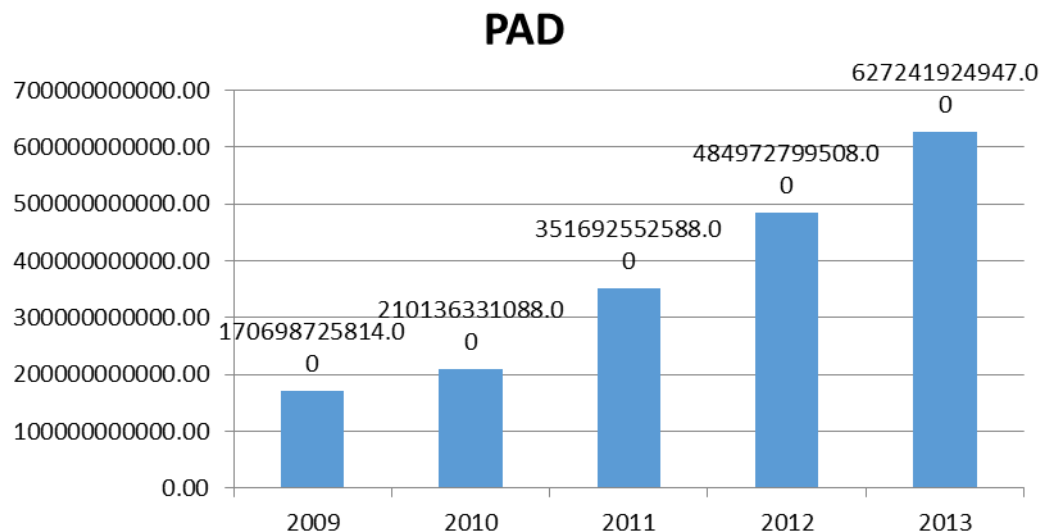
4.549.192.622 atau sebesar 14,15%, sehingga dari hasil analisis tersebut di atas jumlah penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berikut merupakan data mengenai pendapatan asli daerah dari tahun 2009-2013.

Tabel 4.4 Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 S/D 2013

Tahun	Besarnya Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2009	170.698.725.814
2010	210.136.331.088
2011	351.692.552.588
2012	484.972.799.508
2013	627.241.924.947
Rata-Rata Pertahun	368.948.466.789

Sumber : Dispenda Kota Makassar



Grafik 4.1 Data Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.4 dan grafik 4.1, penerimaan pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan PAD pertahun sebesar Rp. 368.948.466.789. Sehingga dengan adanya data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam 5 tahun terakhir maka akan dapat disajikan pertumbuhan pendapatan asli daerah (tahun 2009-2013) yang dapat dilihat pada tabel 5 yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.5 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 S/D 2013

Tahun	Besarnya Pendapatan Asli Ddaerah (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	%
2009	170.698.725.814	-	-
2010	210.136.331.088	39.437.605.274	23,10
2011	351.692.552.588	141.556.221.500	67,36
2012	484. 972.799.508	133.280.246.920	37,89
2013	627.241.924.947	142.269.125.439	29,33
Rata-Rata Pertumbuhan pertahun		114.135.799.783	39,42

Sumber : Hasil olahan data

Berdasarkan hasil analisis mengenai pertumbuhan, pendapatan asli daerah khususnya dalam 5 tahun terakhir tahun 2009-2013 rata-rata pertahun meningkat sebesar Rp. 114.135.799.783 atau sebesar 39,42%.

#### 4.1.1 Analisis Kontribusi Pajak Reklame

Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar dihitung dengan membandingkan pajak reklame dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam menghitung kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar menggunakan rumus sebagai berikut.

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

$P_n$  = Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah  
(rupiah)

$QY_n$  = Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah)

$QX_n$  = Penerimaan pajak reklame (rupiah)

$n$  = Tahun (periode) tertentu

$$\text{Tahun 2009} = \frac{7.093.462.210}{170.698.725.814} \times 100\% = 4.15 \%$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{11.336.841.164}{210.136.331.088} \times 100\% = 5.39 \%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{16.936.119.593}{351.692.552.588} \times 100\% = 4.81 \%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{19.067.461.127}{484.972.799.508} \times 100\% = 3.93\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{19.581.691.485}{627.241.924.947} \times 100\% = 3.12\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2009-2013

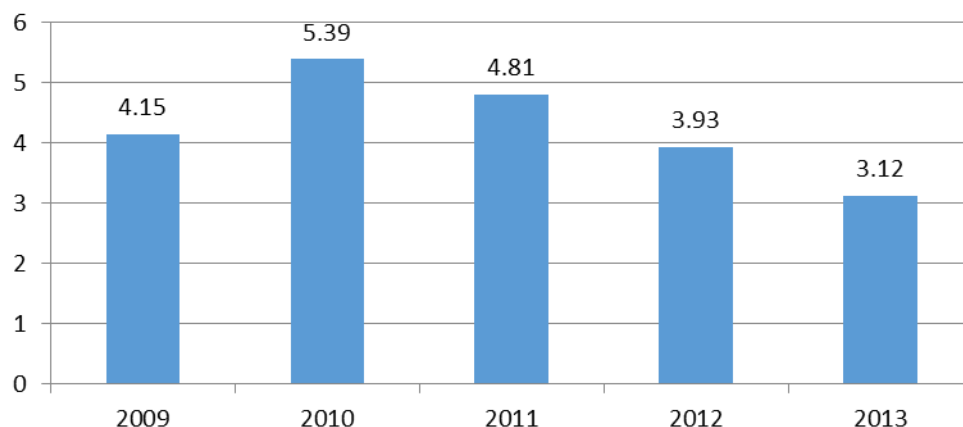
No	Tahun Anggaran	Pajak Reklame (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2009	7.093.462.210	170.698.725.814	4.15
2	2010	11.336.841.164	210.136.331.088	5.39
3	2011	16.936.119.593	351.692.552.588	4.81
4	2012	19.067.461.127	484. 972.799.508	3.93
5	2013	19.581.691.485	627.241.924.947	3.12

Sumber: Data diolah

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

### KONTRIBUSI PAJAK REKLAME



Grafik 4.2 Kontribusi Pajak Reklame

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar tahun anggaran 2009-2013 berubah-ubah mulai dari 3,12% sampai 5,39% atau rata-rata per tahun 4,28%. Pada tahun 2009 kontribusi pajak reklame sebesar 4,15%, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu 5,39% dan

mengalami penurunan di tahun 2011, 2012 dan 2013. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun sebesar 4,28% dan dapat dikatakan relatif kecil.

#### 4.1.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar dihitung dengan membandingkan pajak hotel dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P<sub>n</sub> = Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (rupiah)

QY = Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah)

QX = Penerimaan pajak Hotel (rupiah)

n = Tahun (periode) tertentu

Tahun 2009 =	$\frac{26.320.810.853}{170.698.725.814}$	x 100% = 15.41 %
Tahun 2010 =	$\frac{31.617.040.229}{210.136.331.088}$	x 100% = 15.04 %
Tahun 2011 =	$\frac{35.099.580.609}{351.692.552.588}$	x 100% = 9.98%
Tahun 2012 =	$\frac{37.706.182.022}{484.972.799.508}$	x 100% = 7.77%
Tahun 2013 =	$\frac{44.517.581.341}{627.241.924.947}$	x 100% = 7.09%



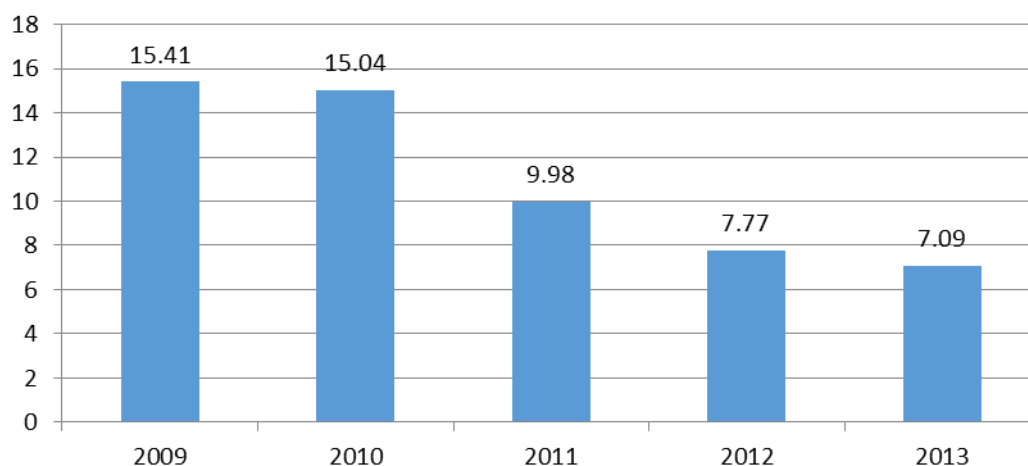
Tabel 4.7 Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2009-2013

No	Tahun Anggaran	Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2009	26.320.810.853	170.698.725.814	15.41
2	2010	31.617.040.229	210.136.331.088	15.04
3	2011	35.099.580.609	351.692.552.588	9.98
4	2012	37.706.182.022	484.972.799.508	7.77
5	2013	44.517.581.341	627.241.924.947	7.09

Sumber: Data diolah

Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah

### KONTRIBUSI PAJAK HOTEL



Grafik 4.3 Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dapat diperhatikan besarnya kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar tahun anggaran 2009-2013 bervariasi mulai dari 7,09% sampai 15,41% atau rata-rata 11,06% per tahun. Tahun 2009 kontribusi pajak hotel sebesar 15,41% dan terus menurun mulai tahun 2010 sampai 2013 masing-masing sebesar 15,04% di tahun 2010, 9,98% di tahun

2011, 7,77% di tahun 2012 dan 7,09% di tahun 2013. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun terakhir 11,06% dan dapat dikatakan masih relatif kecil.

#### 4.1.3 Efektivitas Pajak Reklame Kota Makassar

Tingkat efektivitas pajak reklame dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak reklame dengan target pajak reklame. Cara menghitung efektivitas pajak reklame Kota Makassar menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{Target penerimaan pajak reklame}} \times 100 \%$$

Tahun 2009 =	$\frac{7.093.462.210}{10.079.284.950}$	x 100% = 70.38 %
Tahun 2010 =	$\frac{11.336.841.164}{10.386.827.000}$	x 100% = 109.15 %
Tahun 2011 =	$\frac{16.936.119.593}{16.000.079.000}$	x 100% = 105.85%
Tahun 2012 =	$\frac{19.067.461.127}{18.448.581.150}$	x 100% = 103.35%
Tahun 2013 =	$\frac{19.581.691.485}{20.448.580.000}$	x 100% = 95.76%

Selanjutnya hasil perhitungan disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 4.8 Efektivitas pajak reklame kota Makassar Tahun Anggaran 2009-2013

No	Tahun Anggaran	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Efektifitas Pajak Reklame (%)
1	2009	10.079.284.950	7.093.462.210	70.38
2	2010	10.386.827.000	11.336.841.164	109.15
3	2011	16.000.079.000	16.936.119.593	105.85
4	2012	18.448.581.150	19.067.461.127	103.35
5	2013	20.448.580.000	19.581.691.485	95.76

Sumber: Data diolah



**Grafik 4.4 Efektivitas Pajak Reklame**

Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, dapat diperhatikan pada tahun 2009 diperoleh persentase sebesar 70.35%. Tingkat persentase ini menandakan bahwa pada tahun 2009 pemungutan pajak reklame di Kota Makassar tergolong kurang efektif. Sementara untuk tahun 2010-2012 diperoleh

persentase sebesar, 109.15%, 105.85%, 103.35%, namun trennya menurun. Hal ini menunjukkan pemungutan pajak reklame yang tergolong kurang efektif pada tahun 2009 menjadi efektif pada tahun 2010-2012, sementara untuk tahun 2013 diperoleh persentase sebesar 95.76%. Tingkat persentase ini menandakan bahwa pada tahun tahun 2013 pemungutan pajak reklame di Kota Makassar tergolong cukup efektif. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2009-2013 Pemerintah Kota Makassar telah berhasil dalam hal memperbaiki tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame.

#### 4.1.4 Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar

Tingkat efektivitas pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak hotel dengan target pajak reklame. Dalam menghitung efektivitas pajak reklame Kota Makassar menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{Target penerimaan pajak reklame}} \times 100 \%$$

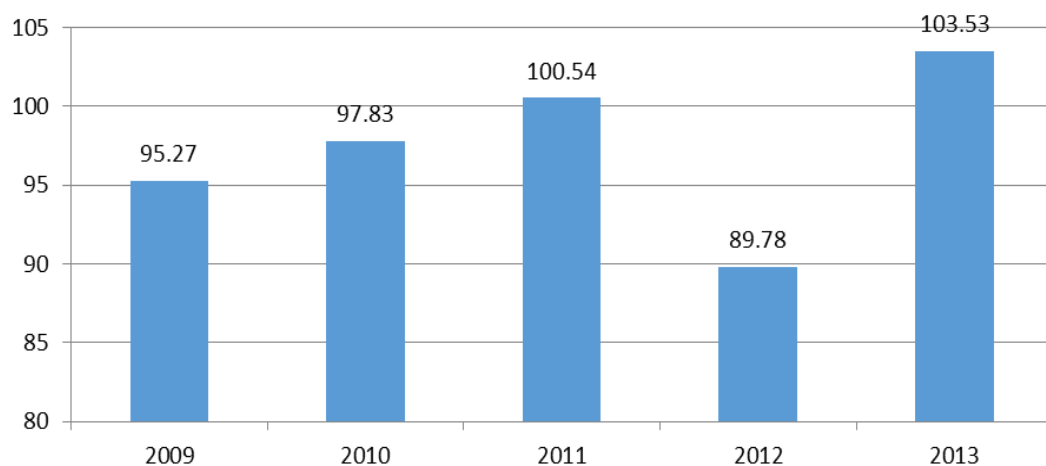
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2009} &= \frac{26.320.810.853}{27.627.281.850} \times 100\% = 95.27 \% \\ \text{Tahun 2010} &= \frac{31.617.040.229}{32.323.240.000} \times 100\% = 97.82 \% \\ \text{Tahun 2011} &= \frac{35.099.580.609}{42.000.358.000} \times 100\% = 100.54\% \\ \text{Tahun 2012} &= \frac{37.706.182.022}{42.000.358.000} \times 100\% = 89.78\% \\ \text{Tahun 2013} &= \frac{44.517.581.341}{43.000.000.000} \times 100\% = 103.53\% \end{aligned}$$

Tabel 4.9 Efektivitas pajak hotel kota Makassar Tahun Anggaran 2009-2013

No	Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektifitas Pajak Hotel (%)
1	2009	27.627.281.850	26.320.810.853	95.27
2	2010	32.323.240.000	31.617.040.229	97.82
3	2011	34.823.238.000	35.099.580.609	100.54
4	2012	42.000.358.000	37.706.182.022	89.78
5	2013	43.000.000.000	44.517.581.341	103.53

Sumber: Data diolah

### EFEKTIVITAS HOTEL



**Grafik 4.5 Efektivitas Pajak Hotel**

Pada tahun 2009-2010 diperoleh persentase sebesar 95.27% dan 97.82%. Tingkat persentase ini menandakan bahwa pada tahun 2009-2010 pemungutan pajak hotel di Kota Makassar tergolong cukup efektif. Sementara untuk tahun tahun 2011 diperoleh persentase sebesar 100,54%, tingkat persentase ini menandakan bahwa pada tahun 2011 pemungutan pajak hotel tergolong efektif, hal ini juga menandakan bahwa terjadi peningkatan prestasi

yang signifikan dalam pengelolaan pajak daerah khususnya pajak hotel. Pada tahun 2012 diperoleh persentase sebesar 89.78%, hal ini menunjukkan penurunan tingkat persentase. Penurunan persentase tersebut menandakan bahwa pada tahun 2012 kategori pemungutan pajak hotel di Kota Makassar menurun menjadi cukup efektif. Pada tahun 2013 diperoleh persentase sebesar 103.53%. Tingkat persentase ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 pemungutan pajak hotel di Kota Makassar tergolong efektif, hal ini juga menunjukkan terjadinya peningkatan prestasi yang sangat signifikan dalam pengelolaan pajak daerah khususnya pajak hotel. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2009-2013 pemerintah Kota Makassar telah berhasil dalam hal memperbaiki tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel.

#### **4.3 Pembahasan**

Hasil penelitian mengenai analisis kontribusi pajak reklame terhadap PAD menunjukkan tren presentase kontribusi yang menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan presentase tersebut berbanding terbalik dengan kondisi PAD yang terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD relatif kecil.

Penurunan presentase kontribusi pajak reklame juga berbanding terbalik dengan efektivitas pajak reklame yang trennya cenderung naik dalam lima tahun terakhir. Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pajak reklame tinggi namun tidak menjamin tingginya kontribusi pajak reklame terhadap PAD.

Pada analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD didapatkan bahwa tren presentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD terus menurun dalam lima tahun terakhir. Serupa dengan kontribusi pajak reklame terhadap PAD, kontribusi pajak hotel juga berpengaruh terbalik terhadap PAD yang terus naik dalam lima tahun

terakhir. Hal tersebut menunjukkan pengaruh atau kontribusi pajak hotel terhadap PAD relatif kecil.

Tren efektivitas pajak hotel berbanding terbalik dengan kontribusi pajak hotel. Efektivitas pajak hotel cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir sedangkan kontribusi pajak hotel cenderung menurun. Perbandingan tren tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel tidak mampu menaikkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV maka disajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Kontribusi penerimaan pajak reklame dan hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun anggaran 2009-2013 relatif tidak signifikan karena tren keduanya berbanding terbalik dengan PAD yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir.
2. Efektivitas penerimaan pajak reklame dan hotel juga menurun dalam lima tahun terakhir (2009-2013), sehingga belum mampu menopang peningkatan kontribusi pajak reklame dan hotel terhadap PAD.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah agar upaya untuk memungut pajak reklame dan pajak hotel perlu ditingkatkan guna dapat meningkatkan kontribusi ke PAD.
2. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. DISPENDA juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya dan dalam menjalankan aturan yang diterapkan oleh DISPENDA.



3. DISPENDA seharusnya lebih aktif dalam melakukan penertiban terhadap reklame yang terpasang yang sudah lewat masa pemasangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abut Hilarius, 2007. *Perpajakan, buku satu, cetakan pertama*. Penerbit: Diadit Media. Jakarta
- Adi, N, B. 2012. *Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri)*, (Online), (<http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/33957>, diakses 28 Oktober 2014).
- Casavera, 2009, *Perpajakan*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta
- Fidel, 2011, *Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No. 36/2008 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Komentar Pasal Per Pasal) Dilengkapi dengan Persandingan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, cetakan pertama, Penerbit : KKPF-SMART & Co Publisihing, Jakarta
- Fausi Ahmad dan Iskandar. 2007. *Cara Membaca Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*, cetakan kesatu. Penerbit : Lembaga penerbit Universitas Brawijaya. Malang
- Helvianti, 2009, *Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir-Riau*. Universitas Sumatra Utara Riau.
- Himpunan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. 2010. Makassar: Dinas Pendapatan Kota Makassar.
- Komala, Dwi Tiyasari, 2010. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal*. Institut Pertanian Bogor, (Online), (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/62542>, diakses 24 Oktober 2014).
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*, edisi revisi, cetakan kedelapanbelas. Penerbit: Andi. Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pedoman Penulisan Skripsi*. 2012. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*, edisi pertama. penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

- Saragih Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. cetakan pertama. Penerbit: Ghalia Indonesia. Jakarta
- Siahaan, M.P. 2013. *Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Siagian, P. Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, edisi pertama, Penerbit : Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sonyoto Danang, 2012 Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, cetakan pertama, Penerbit : Gava Media, Yogyakarta
- Sulistiawati, Irma, 2014 Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Universitas Hasanuddin, Makassar
- Triantoro, A. 2010. Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Fokus Ekonomi*, (online), Vol.5, No.1, (<https://www.google.com/#psj=1&q=efektifitas+pemungutan+pajak+rekla me>, diakses 28 Oktober 2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2011. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia Edisi 1 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yolina, Meilani S. 2009. Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan, cetakan pertama. Penerbit: Tabora Media. Yogyakarta

## LAMPIRAN 1

**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Andi Mahyudin Pawiloi  
 Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 14 Maret 1991  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat Rumah : BTN Pao-Pao Blok C14 No. 23  
 Telepon Rumah dan Hp : 081242038176  
 Alamat E-mail : pawiloiyudi@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

Pendidikan Formal :  
     SD Negeri 7 Letta 1996-2002  
     SMP Negeri 2 bantaeng 2002-2005  
     SMA Negeri 2 Bantaeng 2006-2009  
     S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
     Hasanuddin Makassar 2010-2014

**Pendidikan Non Formal**

Bina Kader Mahasiswa Akuntansi XVII FEB-Unhas

**Pengalaman**

Organisasi :

Panitia 7<sup>th</sup> Hasanuddin Accounting Days 2013 Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEB-Unhas

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, Nopember 2014

Andi Mahyudin Pawiloi

## LAMPIRAN 2

**DAFTAR REKAPITULASI : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
TAHUN ANGGARAN 2009 – 2013**

NO.	URAIAN PENERIMAAN	TAHUN 2009			TAHUN 2010			TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013	
		TARGET TAHUN 2009	REALISASI	%	TARGET TAHUN 2010	REALISASI	%	TARGET TAHUN 2011	REALISASI	%	TARGET TAHUN 2012	REALISASI	%	TARGET TAHUN 2013	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>														
1	PAJAK DAERAH	115.213.922.000	115.223.338.974	100,01	134.216.181.000	133.551.818.678	99,51	260.486.460.000	270.547.821.316	103,86	337.167.338.150	388.445.926.266	115,21	460.567.090.000	518.703.083.895
2	RETRIBUSI DAERAH	44.281.324.000	39.980.839.820	90,29	62.971.506.000	59.729.103.725	94,85	66.549.806.000	62.043.147.863	93,23	84.141.194.850	69.257.410.559	82,31	86.772.319.000	79.650.936.626
3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH & HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DISERAHKAN	5.946.037.000	5.665.752.808	95,29	6.124.203.000	5.817.813.865	95,00	6.391.525.000	6.355.200.148	99,43	6.553.899.000	6.448.544.026	98,39	6.975.558.000	6.355.687.311
4	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	11.187.084.000	9.828.794.212	87,86	13.617.000.000	11.037.594.820	81,06	11.907.520.000	12.746.383.261	107,04	13.372.520.000	20.820.918.637	155,70	15.412.495.000	22.332.217.115
	<b>JUMLAH PAD</b>	<b>176.628.387.000</b>	<b>170.698.725.814</b>	<b>96,64</b>	<b>216.928.890.000</b>	<b>210.136.331.088</b>	<b>96,87</b>	<b>345.335.311.000</b>	<b>351.692.552.588</b>	<b>101,84</b>	<b>441.234.952.000</b>	<b>484.972.799.508</b>	<b>109,91</b>	<b>569.727.462.000</b>	<b>627.241.924.947</b>
<b>B</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>														
1	BAGI HASIL PAJAK	132.700.443.000	142.662.186.490	107,51	176.354.985.000	170.552.155.100	96,71	141.816.546.000	124.804.208.709	88,00	142.585.034.000	160.543.559.310	112,59	76.420.044.000	85.548.577.766
2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.843.840.000	721.325.116	39,12	1.805.840.000	708.265.127	39,22	1.805.840.000	1.690.398.816	93,61	1.364.157.000	1.152.927.344	84,52	1.150.985.000	1.260.187.029
	<b>JUMLAH BAGI HASIL</b>	<b>134.544.283.000</b>	<b>143.383.511.606</b>	<b>106,57</b>	<b>178.160.825.000</b>	<b>171.260.420.227</b>	<b>96,13</b>	<b>143.622.386.000</b>	<b>126.494.607.525</b>	<b>88,07</b>	<b>143.949.191.000</b>	<b>161.696.486.654</b>	<b>112,33</b>	<b>77.571.029.000</b>	<b>86.808.764.795</b>
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>311.172.670.000</b>	<b>314.082.237.420</b>	<b>100,94</b>	<b>395.089.715.000</b>	<b>381.396.751.315</b>	<b>96,53</b>	<b>488.957.697.000</b>	<b>478.187.160.113</b>	<b>97,80</b>	<b>585.184.143.000</b>	<b>646.669.286.162</b>	<b>110,51</b>	<b>647.298.491.000</b>	<b>714.050.689.742</b>
3	DANA ALOKASI UMUM	647.299.704.000	647.299.704.000	100,00	644.266.427.000	644.266.427.000	100,00	718.481.339.000	718.481.320.000	100,00	911.122.797.000	911.122.797.000	100,00	1.033.583.903.000	1.033.583.903.000
4	DANA ALOKASI KHUSUS	43.151.000.000	43.151.000.000	100,00	45.753.700.000	45.753.700.000	100,00	60.898.100.000	60.898.000.000	100,00	32.644.320.000	32.644.320.000	100,00	40.886.880.000	40.886.880.000
	<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>824.994.987.000</b>	<b>833.834.215.606</b>	<b>101,07</b>	<b>868.180.952.000</b>	<b>861.280.547.227</b>	<b>99,21</b>	<b>923.001.825.000</b>	<b>905.873.927.525</b>	<b>98,14</b>	<b>1.087.716.308.000</b>	<b>1.105.463.603.654</b>	<b>101,63</b>	<b>1.152.041.812.000</b>	<b>1.161.279.547.795</b>
<b>C</b>	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>														
1	PENDAPATAN HIBAH DARI LUAR NEGERI	651.006.000	1.559.018.800	239,48	-	650.445.600	-	1.650.000.000	970.971.485	58,85	-	-	-	-	-
2	DANA DARURAT	-	-	-	100.000.000	100.000.000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	121.500.000.000	115.012.318.874	94,66	148.066.788.000	155.704.122.538	105,16	167.338.118.000	166.494.273.844	99,50	186.622.687.440	194.255.865.128	104,09	209.916.715.000	222.860.704.035
4	DANA PENYESUAIAN	49.180.487.000	68.965.037.000	140,23	191.744.564.000	190.426.514.332	99,31	262.313.899.000	262.927.499.880	100,23	211.436.166.000	211.436.166.000	100,00	297.058.872.000	297.058.872.914
5	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH LAINNYA	24.793.296.800	25.648.404.800	103,45	31.364.687.000	31.364.688.800	100,00	40.471.289.000	40.611.289.800	100,35	49.996.979.560	49.996.979.560	100,00	58.911.771.000	58.911.771.360
	<b>JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>196.124.789.800</b>	<b>211.184.779.474</b>	<b>107,68</b>	<b>371.276.039.000</b>	<b>378.245.771.270</b>	<b>101,88</b>	<b>471.773.306.000</b>	<b>471.004.035.009</b>	<b>99,84</b>	<b>448.055.833.000</b>	<b>455.689.010.688</b>	<b>101,70</b>	<b>565.887.358.000</b>	<b>578.831.348.309</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN (A+B+C)</b>	<b>1.197.748.163.800</b>	<b>1.215.917.720.894</b>	<b>101,50</b>	<b>1.456.385.881.000</b>	<b>1.449.662.649.585</b>	<b>99,54</b>	<b>1.740.110.442.000</b>	<b>1.728.570.515.122</b>	<b>99,34</b>	<b>1.977.007.093.000</b>	<b>2.046.125.413.850</b>	<b>103,50</b>	<b>2.287.656.632.000</b>	<b>2.367.352.821.050</b>

## LAMPIRAN 3

## RINCIAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN APBD KOTA MAKASSAR TA.2009 S/D 2013

URAIAN PENERIMAAN	TAHUN 2009			TAHUN 2010			TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013
	TARGET 2009	REALISASI	%	TARGET 2010	REALISASI	%	TARGET 2011	REALISASI	%	TARGET 2012	REALISASI	%	
2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DAPATAN ASLI DAERAH	176.628.387.000,00	170.698.725.814,00	96,64	216.928.890.000,00	210.136.331.088,00	96,87	345.335.311.000,00	351.692.552.588,00	101,84	441.234.952.000,00	484.972.799.508,00	109,91	525.847,00
AK DAERAH	115.213.922.000,00	115.223.338.974,00	100,01	134.216.181.000,00	133.551.818.678,00	99,51	260.486.460.000,00	270.547.821.316,00	103,86	337.167.338.150,00	388.445.926.266,00	115,21	436.725,00
Hotel	26.311.697.000,00	26.320.810.853,00	100,03	32.123.240.000,00	31.614.040.229,00	97,81	34.823.238.000,00	35.009.580.559,00	100,54	42.000.362.000,00	37.706.161.036,00	89,78	42.000,00
Restoran	27.488.304.000,00	27.488.304.000,00	100,00	33.817.110.000,00	31.065.197.328,00	91,86	36.317.110.000,00	36.014.223.069,00	99,17	44.697.362.000,00	42.965.891.390,00	96,13	45.697,00
Hiburan	9.051.721.100,00	9.138.442.848,00	100,96	10.845.663.000,00	9.949.117.191,00	91,74	14.000.000.000,00	10.251.433.002,00	73,22	14.175.000.000,00	13.677.812.213,00	96,49	14.675,00
Reklame	9.599.327.000,00	7.693.461.910,00	79,99	10.396.827.000,00	11.401.144.164,00	109,77	16.000.079.000,00	16.936.808.593,00	105,85	18.448.581.150,00	19.067.461.127,00	103,35	20.448,00
Penerangan Jalan	40.150.000.000,00	42.949.942.512,00	106,97	43.650.000.000,00	46.878.541.996,00	107,40	45.000.000.000,00	65.779.109.919,00	101,30	89.500.000.000,00	92.806.812.947,00	103,69	90.500,00
Pengambilan dan Pengolahan B.Gal.Gol.C	100.000.000,00	172.831.951,00	172,83	100.000.000,00	138.084.055,00	138,08	121.376.000,00	196.909.109,00	162,24	121.376.000,00	252.151.402,00	207,74	121,00
Parkir	2.512.872.900,00	2.054.544.900,00	81,76	3.093.341.000,00	2.505.493.805,00	81,00	4.000.000.000,00	4.600.259.625,00	115,01	5.500.000.000,00	6.131.708.518,00	111,49	5.500,00
Air Bawah Tanah	-	-	-	-	-	-	174.657.000,00	115.661.908,00	66,32	174.657.000,00	158.027.896,00	90,48	174,00
Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	12.462.500,00	24,93	50.000.000,00	10.835.000,00	21,67	50,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	90.000.000.000,00	101.631.373.033,00	112,92	122.500.000.000,00	175.669.064.737,00	143,40	139.720,00
Bumi dan Bangunan Sektor P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.837,00
41BISI DAERAH	44.281.324.000	39.980.839.820	90,29	62.971.506.000,00	59.729.103.725,00	94,85	66.549.806.000,00	62.043.147.863,00	93,23	84.141.194.850,00	69.237.410.559,00	82,31	70.300,00
Ibustasi Jasa Umum	15.702.533.000	13.704.873.421	87,28	27.065.958.000,00	22.702.164.481,00	83,88	27.166.244.000,00	23.130.101.084,00	85,14	34.310.135.000,00	21.077.864.220,00	61,43	30.452,00
Ibustasi Pelayanan Kesehatan	5.642.058.000	4.784.671.201	84,80	13.204.342.000,00	10.170.573.737,00	77,02	14.038.551.000,00	11.978.839.414,00	85,33	18.744.745.000,00	10.681.479.274,00	56,98	18.951,00
Kesehatan (Dinas Kesehatan)	2.508.508.000	2.067.113.601	82,40	6.378.902.000,00	5.969.790.925,00	93,60	7.467.956.000,00	7.014.299.600,00	93,93	8.708.924.000,00	3.827.539.048,00	43,95	8.763,00
Kesehatan (Rumah Sakti Daya)	1.131.550.000	2.717.557.600	86,72	6.826.140.000,00	4.200.782.812,00	61,54	6.570.595.000,00	4.964.539.814,00	75,56	10.035.821.000,00	6.853.940.226,00	68,29	10.185,00
Ibustasi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.035.352.000	1.718.511.500	56,62	5.449.665.000,00	3.828.496.230,00	70,25	5.596.163.000,00	3.705.187.560,00	66,21	5.596.163.000,00	3.804.416.908,00	67,98	5.781,00
Pengantian Biaya KTP & Akte Catatan Sipil	3.519.170.000	3.874.687.500	110,10	4.400.000.000,00	4.966.000.000,00	112,87	4.112.303.000,00	4.320.665.000,00	105,93	6.400.000.000,00	3.380.940.000,00	51,21	2.250,00
Pelayanan Pemakaman & Penguburan Mayat	250.007.000	442.085.000	176,83	197.600.000,00	371.200.000,00	187,85	304.237.000,00	520.400.000,00	171,05	304.237.000,00	494.250.000,00	162,46	304,00
Ibustasi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.178.640.000	1.941.079.720	89,19	2.208.640.000,00	1.728.405.650,00	78,26	2.414.990.000,00	1.879.715.110,00	77,84	2.414.990.000,00	2.057.954.140,00	85,22	2.414,00
Ibustasi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	300.720.000	253.680.000	84,36	350.000.000,00	352.523.182,00	100,72	350.000.000,00	355.294.000,00	101,51	350.000.000,00	389.570.000,00	111,31	400,00
Ibustasi Pengujian Kapal Perikanan	26.586.000	26.586.000	100,00	26.586.000,00	26.586.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Jasa Kota-tanahan	750.800.000	661.572.500	88,21	750.000.000,00	786.320.000,00	104,84	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Ketengaga Kerjaan	-	-	-	150.000.000,00	119.190.000,00	100,03	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	142.285.000,00	94,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Pembinaan Koperasi	-	-	-	210.504.692,00	100,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	220.251.906,00	110,13	250,00
Ibustasi Sewa Pelataran Anjungan Losari	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	170.000.000,00	113,33	100.000.000,00	49.000.000,00	49,00	100,00
Ibustasi Jasa Usaha	9.007.076.000	7.105.155.840	78,88	13.131.018.000,00	12.599.290.894,00	95,95	14.991.018.000,00	11.045.910.852,00	73,68	17.808.859.850,00	12.875.141.139,00	72,30	11.490,00
Ibustasi Pemakatan Kelayaan Daerah	6.479.309.000	4.894.467.040	75,54	10.582.117.000,00	10.374.281.894,00	98,04	13.155.416.000,00	9.775.485.852,00	74,31	15.717.496.850,00	11.622.086.139,00	73,94	9.940,00
Tanah / Bangunan	81.685.000	27.016.365	32,28	981.685.000,00	15.108.008,00	1,57	944.500.000,00	92.376.100,00	9,78	981.685.000,00	88.288.500,00	8,98	59,00
akalan tanah	1.111.400.000	1.068.850.900	96,17	2.186.040.000,00	2.202.116.000,00	100,74	2.986.050.000,00	2.991.759.000,00	100,19	4.496.277.000,00	6.409.434.839,00	142,55	195,00
nakaian tanah untuk Bahu Bangunan	800.100.000	813.704.900	102,95	2.000.100.000,00	2.133.105.000,00	106,75	2.800.110.000,00	2.930.354.400,00	104,65	4.312.275.000,00	4.312.275.000,00	100,26	-
nakaian tanah untuk PK 5	180.000.000	174.246.000	96,80	185.940.000,00	67.011.000,00	36,04	185.940.000,00	61.405.000,00	33,02	2.097.159.839,00	1.074.16	195,00	
nakaian tanah Lapang & Taman	131.300.000	70.900.000	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat Berat	375.000.000	107.430.000	28,65	195.210.000,00	134.730.000,00	69,02	5.210.000,00	73.615.000,00	1.412,96	5.210.000,00	8.250.000,00	158,35	5,00
ufangan Makassar	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
akalan Tanah Untuk Pemas.Reklame	1.500.474.000	1.272.527.700	84,81	1.750.683.000,00	2.104.327.886,00	120,20	2.249.656.000,00	1.912.433.331,00	85,01	2.491.324.850,00	1.712.454.570,00	68,74	2.362,00
Penawaran Titik Reklame	2.500.000.000	2.418.642.075	96,75	5.466.500.000,00	5.898.000.000,00	107,89	6.970.000.000,00	4.705.302.821,00	67,51	7.741.000.000,00	3.403.658.230,00	43,97	7.318,00
gunaan Mobil jenazah	8.750.000	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Tempat Pelanggaran Ikan	882.937.000	882.937.000	100,00	882.937.000,00	886.105.000,00	100,36	862.002.000,00	868.165.000,00	100,71	1.117.763.000,00	921.240.000,00	82,42	1.117,00
Ibustasi Penyediaan / Penyedotan Kakus	286.456.000	-	0,00	849.600.000,00	520.050.000,00	61,21	949.600.000,00	378.260.000,00	39,83	949.600.000,00	307.815.000,00	32,42	408,00
Ibustasi Pemeriksaan Hewan / Daging	352.484.000	318.411.800	90,33	352.484.000,00	327.043.000,00	92,78	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	403.650.000	411.392.000	101,92	439.900.000,00	467.811.000,00	106,34	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Penyebancangan diatas Air	31.350.000	23.000.000	73,37	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24,00
Ibustasi Ketengaga Kerjaan	269.015.000	269.749.000	100,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Informasi dan Komunikasi	136.875.000	139.800.000	102,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Pembinaan Koperasi	165.000.000	165.389.000	100,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibustasi Perizinan Tercentu	19.571.715.000,00	19.170.810.559,00	97,95	22.774.510.000,00	24.427.648.350,00	107,26	24.392.544.000,00	27.867.135.927,00	114,24	32.022.200.000,00	35.304.405.200,00	110,25	28.358,00
Ibustasi Izin Mendirikan Bangunan	15.000.000.000,00	15.228.086.559,00	101,52	17.700.000.000,00	19.476.301.100,00	110,04	21.000.000.000,00	25.084.397.177,00	119,45	31.000.000.000,00	34.413.022.200,00	111,01	26.000,00
Ibustasi Izin Tempat Penjualan Min.Beralkohol	192.500.000,00	115.500.000,00	60,00	237.500.000,00	186.000.000,00	78,32	186.000.000,00	102.500.000,00	54,57	46.000.000,00	-	-	227,00
Ibustasi Izin Gangguan/Keramaian	2.263.000.000,00	1.737.569.000,00	76,78	2.108.265.000,00	2.155.796.000,00	102,66	2.643.344.000,00	2.307.473.750,00	87,29	554.000.000,00	418.668.000,00	75,57	1.673,00



NO.	URAIAN PENERIMAAN	TAHUN 2009			TAHUN 2010			TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013		
		TARGET 2009	REALISASI	%	TARGET 2010	REALISASI	%	TARGET 2011	REALISASI	%	TARGET 2012	REALISASI	%	TARGET 2013	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	176.638.387,000,00	170.698.735.814,00	96,64	216.928.890.000,00	210.136.331.088,00	96,87	345.335.311.000,00	351.052.552.588,00	101,84	441.234.912.000,00	484.975.799.808,00	109,91	505.727.463.000,00	627.241.924.946,74	110,10
A.1	PAJAK DAERAH	115.213.922.000,00	115.223.338.974,00	100,01	134.216.181.000,00	133.551.818.678,00	99,51	260.486.460.000,00	220.547.821.316,00	101,86	337.167.338.150,00	388.445.926.266,00	115,21	460.567.090.000,00	518.703.083.895,13	112,62
1	Pajak Hotel	26.311.697.000,00	26.320.810.853,00	100,03	32.323.240.000,00	31.614.040.229,00	97,81	34.823.238.000,00	35.009.580.519,00	100,54	42.000.362.000,00	37.706.161.636,00	89,78	43.000.000.000,00	44.517.581.343,00	103,53
2	Pajak Restoran	27.488.304.000,00	27.488.304.000,00	100,00	33.817.110.000,00	31.065.197.328,00	91,86	36.014.223.000,00	36.014.223.000,00	99,17	44.697.352.000,00	42.965.891.390,00	96,13	46.197.366.000,00	52.028.379.299,00	112,63
3	Pajak Hiburan	9.051.751.100,00	9.138.442.848,00	100,36	10.845.663.000,00	9.940.317.191,00	91,74	14.000.000.000,00	10.251.433.000,00	73,22	14.175.000.000,00	13.677.812.213,00	96,49	15.175.000.000,00	16.305.722.524,00	107,45
4	Pajak Reklame	9.599.327.000,00	7.693.461.916,00	73,90	10.386.827.000,00	11.401.144.164,00	109,77	16.000.079.000,00	16.936.808.593,00	105,85	18.448.581.150,00	19.067.461.127,00	103,35	21.000.000.000,00	19.681.619.591,00	93,72
5	Pajak Penerangan jalan	40.150.000.000,00	42.949.942.512,00	106,97	43.650.000.000,00	46.878.541.906,00	107,40	65.000.000.000,00	65.779.105.918,00	101,10	89.500.000.000,00	92.806.812.747,00	103,69	103.000.000.000,00	114.679.005.552,03	111,34
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan B.Gal.Gol.C	100.000.000,00	177.831.751,00	177,83	100.000.000,00	138.084.055,00	138,08	121.376.000,00	196.909.105,00	162,23	121.376.000,00	252.151.402,00	207,54	171.378.000,00	311.635.122,00	181,84
7	Pajak Parkir	2.512.872.900,00	2.654.544.900,00	81,76	3.093.341.000,00	2.505.493.805,00	81,00	4.000.000.000,00	4.600.219.625,00	115,01	5.900.000.000,00	6.431.708.518,00	111,49	7.000.000.000,00	9.913.381.695,00	141,62
8	Pajak Air Bawah Tanah							174.657.000,00	115.661.903,00	66,27	174.657.000,00	158.027.896,00	90,48	174.657.000,00	153.895.680,00	88,18
9	Pajak Sarang Burung Walet							50.000.000,00	12.462.500,00	24,93	50.000.000,00	10.835.900,00	21,67	11.000.000,00	14.675.000,00	133,41
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan							90.000.000.000,00	101.631.373.331,00	112,93	122.500.000.000,00	175.669.064.737,00	143,40	146.000.000.000,00	172.173.732.433,00	117,83
11	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2													78.837.689.000,00	88.922.675.656,20	112,79

## LAMPIRAN 4

TARGET DAN REALISASI PAJAK REKLAME 2009-2013

MASA PAJAK	TARGET	REALISASI	%
2009	10,079,284,950	7,093,462,210	70,38%
2010	10,386,827,000	11,336,841,164	109,15%
2011	16,000,079,000	16,936,119,593	105,85%
2012	18,448,581,150	19,067,461,127	103,35%
2013	20,448,580,000	19,581,691,485	95,76%



## LAMPIRAN 5

TARGET DAN REALISASI PAJAK HOTEL 2009-2013

MASA PAJAK	TARGET	REALISASI	%
2009	27,627,281,850	26,320,810,853	95,27%
2010	32,323,240,000	31,617,040,229	97,82%
2011	34,823,238,000	35,009,580,609	100,54%
2012	42,000,358,000	37,706,182,022	89,78%
2013	43,000,000,000	44,517,581,341	103,53%